

Membangun Empati Siswa terhadap Penyandang Disabilitas Melalui Model Sosial Disabilitas di Sekolah Dasar Negeri Kedungudi Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur

Farid Pribadi*; Fransiscus Xaverius Sri Sadewo; Sugeng Harianto; M. Jacky; Diyah Utami;
Dewien Nabelah Agustin; Rizky Trisna Putri
^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya
*Email: faridpribadi@unesa.ac.id

Abstrak

Sikap empati terhadap penyandang disabilitas dilingkungan pendidikan merupakan praktik mewujudkan kesetaraan akan hak-hak dasar manusia. Program Studi Sosiologi FISIPOL Universitas Negeri Surabaya bekerja sama dengan Sekolah Dasar Negeri Kedungudi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto untuk berkolaborasi menyelenggarakan sosialisasi tentang wawasan dan implementasi praktik inklusi sosial dilingkungan sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini sebagai salah satu alternatif cara untuk mengenalkan karakteristik lingkungan siswa disabilitas disekolah yang inklusif dengan model sosial disabilitas (MSD). Hasil PKM ini mampu menghadirkan pengetahuan dan wawasan konkrit tentang praktik inklusi dilingkungan sekolah antara lain hadirnya akses setara terhadap sumber daya dan peluang, pengakuan martabat dan nilai setiap manusia, penghapusan hambatan struktural dan kultural dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Sekolah Ramah Inklusi, Model Sosial Disabilitas, Inklusi Sosial, Sosiologi Inklusi.

Abstract

Empathy toward people with disabilities in educational settings is a practice of realizing equality in basic human rights. The Sociology Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Surabaya State University, collaborated with Kedungudi Elementary School, Trawas District, Mojokerto Regency, to organize a socialization session on the insights and implementation of social inclusion practices in the school environment. This community service (PKM) activity serves as an alternative way to introduce the characteristics of an inclusive school environment for students with disabilities using the Social Disability Model (MSD). The results of this PKM provided concrete knowledge and insights about inclusive practices in the school environment, including equal access to resources and opportunities, recognition of the dignity and worth of every human being, elimination of structural and cultural barriers, and active participation in decision-making.

Keywords: *Inclusion-Friendly Schools, Social Disability Model, Social Inclusion, Sociology of Inclusion.*



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya sebagaimana amanah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berbekal perintah perundang-undangan tersebut dapat dimengerti bahwa pendidikan dirancang dan diselenggarakan oleh negara harus menyentuh pada semua lapisan tanpa ada diskriminasi.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berusaha mewujudkan sekolah ramah anak (SRA). Dasar rujukan SRA adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Ketentuan ini merupakan implementasi dari kebijakan mewujudkan kabupaten/kota layak anak.

SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, bersih dan sehat, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. SRA untuk mengupayakan kualitas dalam bidang: 1) *An inclusive school*; 2) *An effective school*; 3) *A safe and protected school*; 4) *An equity and equality promoting school*; 5) *A health promoting school*; 6) *School-community linkages and partnership* (Unicef, 2009).

Lebih lanjut, didalam SRA juga terdapat cita-cita penting yakni mewujudkan ramah terhadap anak/siswa berkebutuhan khusus (ABK). Melalui pendekatan dan strategi khusus dalam pendidikan anak penyandang disabilitas diharapkan anak penyandang disabilitas dapat: (1) menerima kondisinya; (2) bersosialisasi dengan baik; (3) mampu mengatasi sesuai dengan kemampuannya; (4) mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan; dan (5) berfungsi sebagai warga negara dan anggota masyarakat (Efendi, 2006).

SRA disabilitas (SRAD) juga sebagai bagian realisasi gagasan pemerintah dalam memberikan perhatian kepada ABK melalui kebijakan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Itasari, 2020).

SRAD dapat direalisasikan dengan mendorong pelibatan kolaboratif semua elemen komunitas sekolah, termasuk siswa. SRA memastikan langkah kebijakan

pembangunan di daerah yang ingin menunjukkan kepedulian yang tinggi dan komitmen pada realisasi hak-hak anak.

Realisasi SRAD di satuan pendidikan ini penting untuk memastikan dukungan yang signifikan terhadap ABK, sebagaimana mandat prioritas pembangunan nasional yang sejalan dengan upaya memperkuat potensi sumber daya manusia. Selanjutnya, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (selanjutnya disebut Prodi Sosiologi Fisipol UNESA) berusaha mewujudkan mandat tersebut dengan melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). PKM ini berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Desa Kedungudi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Prodi Sosiologi Fisipol Unesa adalah salah satu prodi yang ditunjuk diberikan mandat oleh pimpinan Fisipol untuk merealisasi pembentukan desa binaan yakni program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk membantu mengatasi masalah, mengembangkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, tim PKM Sosiologi Fisipol Unesa mengambil peran untuk melakukan kegiatan workshop seputar bagaimana menumbuhkan sikap empati warga sekolah kepada penyandang disabilitas dilingkungan sekolah agar tercipta lingkungan inklusif.

Persoalan Sekolah Ramah Anak Disabilitas (SRAD) di Sekolah Dasar Negeri Kedungudi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur belum menerapkan sekolah ramah disabilitas atau sekolah inklusi secara optimal. Hal ini disebabkan, meski telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai salah satu sekolah inklusi, namun menurut Kepala Sekolah Ibu Wiwin pihak sekolah belum mendapatkan pengetahuan dan wawasan serta infrastruktur yang memadai terkait layanan pendidikan berbasis ramah disabilitas.

Kegiatan ini menjadi penting sebagai bukti nyata wujud partisipasi mewujudkan misi poin 4 (empat) dari program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Poin 4 tersebut menghendaki adanya pendidikan berkualitas yang ditandai adanya prinsip yang memastikan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang adil, setara dan berkualitas dalam satu lingkungan belajar yang sama.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Tim PKM Prodi Sosiologi FISIPOL UNESA melakukan kordinasi dengan pihak SDN Kedungudi Kabupaten Mojokerto terkait maksud dan tujuan serta kapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Selain itu, tim PKM juga berkordiansi perihal karakteristik peserta sosialisasi dan peralatan yang telah dibutuhkan.

2. Pelaksanaan.

Tim PKM Sosiologi Fisipol UNESA melakukan kordinasi dengan pengelola sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya terkait perijinan dan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Sekolah Inklusi atau Sekolah Ramah Anak Disabilitas (SRAD). Selanjutnya, tim PKM Sosiologi Fisipol UNESA menyiapkan materi sosiali sasi dan media edukasi (video, brosur, poster).

Berikutnya, tim PKM Sosiologi FISIPOL UNESA melaksanakan sosialisasi seputar pemahanan tentang Inklusi Sosial. Sesi pengenalan tentang inklusi sosial melalui ceramah interaktif dengan guru, orang tua siswa, dan siswa terkait stigma dan stereotip yang sering terjadi terhadap penyandang disabilitas serta pengaruhnya terhadap kehidupan mereka. Penyampaian ini juga didukung dengan penggunaan media edukasi untuk memberikan contoh konkret tentang hak-hak penyandang disabilitas (Oliver, M., 1990; Shakespeare, T., 2006; Barnes, C., & Mercer, G., 2010; Allman, D. 2013; Ainscow, M. 2020).

3. Evaluasi.

Pada tahap ini Tim PKM Sosiologi Fisipol UNESA memberikan pertanyaan kepada peserta seputar sejauh mana pemahaman tentang inklusi sosial dan disabilitas sebelum dan setelah mengikuti program. Selanjutnya setelah mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi *agen of change* ditengah-tengah masyarakat agar mampu mengurangi bahkan menghilangkan tindakan diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Tindak lanjut sesudah kegiatan adalah evaluasi hasil kegiatan akan disampaikan kepada pihak sekolah sebagaimana salah satu bahan pengetahuan dan pemahaman terkait pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok sasaran warga sekolah dalam menumbuhkan sikap empati kepada penyandang disablitas dilingkungan sekolah dan sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SDN Kedungudi yang beralamatkan di Jalan Jolotundo No. 1 Desa Kedungudi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tanggal 22 Agustus 2025.



Gambar 1.1 Sekolah Dasar Negeri Kedungudi No 428 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur

Kegiatan sosialisasi bertajuk 'Membangun Empati Siswa terhadap Penyandang Disabilitas di Sekolah Dasar Kedungudi Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur' ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan agar tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Pertama, perijinan. Tahap mendasar ini bertujuan untuk memperoleh ijin resmi dari pihak Kepala Desa beserta jajaran yang memiliki wewenang dalam melaksanakan program PKM Sosiologi Unesa. Selanjutnya, dari hasil koordinasi dengan pihak kepala desa kemudian diteruskan perijinan ke pihak sekolah SDN Kedungudi Trawas. Tahap ini amatlah penting untuk menjadi modal awal membangun komunikasi awal yang intensif dan konstruktif antara tim PKM Sosiologi Unesa, pemerintah desa dan pihak sekolah SDN Kedungudi Trawas sehingga dapat mendukung tercapainya keberhasilan pkm Sosiologi Unesa.

Kedua, survei lokasi kegiatan. Tahapan ini ditandai tim PKM Sosiologi Unesa mengunjungi SDN Kedungudi Trawas untuk bersilahturahmi dengan pihak sekolah menyampaikan permohonan ijin kegiatan. Selain itu tim juga melakukan inventarisasi permasalahan apa saja yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan sekolah inklusi, kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang perlu disiapkan.

Ketiga, Sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi program PKM Sosiologi Unesa ini dihadapan guru dan orang tua siswa secara langsung di sekolah SDN Kedungudi Trawas. Tujuan sosialisasi ini adalah agar masing-masing peserta memahami dan mengamalkan praktik-praktik inklusi di lingkungan sekolah dan dilingkungan sekitar Desa Kedungudi Trawas.

Selain memberikan materi sosialisasi seputar praktik inklusi di sekolah dengan menggunakan model sosial disabilitas, tim PKM Sosiologi Unesa juga membuka sesi tanya jawab yang interaktif dan membuka kritik dan saran guna kesempurnaan program PKM Sosiologi Unesa kedepan.

Desa Kedungudi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Negeri Surabaya untuk terlibat konkrit dan nyata dalam upaya percepatan pembangunan desa. Sebagai bagian implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, FISIPOL memberikan amanah kepada empat Program Studi yakni Sosiologi, Ilmu Politik, Pendidikan Sejarah dan Hubungan Internasional untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan desa binaan di Desa Kedungudi Trawas. Program Studi Sosiologi mengambil peran berupa kegiatan sosialisasi seputar pengenalan, pemahaman dan praktik bagaimana menciptakan hubungan sosial yang inklusif di lingkungan sekolah dan masyarakat setempat.

Program Studi Sosiologi berkoordinasi dengan pihak Kepala Desa Kedungudi, Bapak Dul Mukti. Koordinasi dengan pihak desa guna mendapatkan informasi seputar profil Sekolah Dasar Negeri Kedungudi yang berlokasi di Desa Kedungudi. Bapak Dul Mukti kemudian mengarahkan agar berkoordinasi dengan Kepala SDN Kedungudi Trawas untuk menjelaskan tujuan, teknis pelaksanaan dan sasaran yang dituju. Bapak Dul Mukti memberikan nama dan nomor kontak Kepala SDN Kedungudi yakni Ibu Wiwin Herowati S.Pd untuk melakukan koordinasi maupun survei ke lokasi.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan Kepala SDN Kedungudi Wiwin Herowati merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk bupati untuk menyelenggarakan sekolah inklusi sejak tahun 2022. Menurut guru yang telah mengabdikan sejak tahun 1998 ini menyatakan bahwa sejak ditetapkan sebagai sekolah inklusi, SDN Kedungudi sekurang-kurangnya telah menerima murid penyandang disabilitas sebanyak 3 (tiga) siswa. Siswa tersebut terdiri dua sudah dinyatakan telah lulus dan satu masih aktif belajar disekolah. Ketiga siswa tersebut adalah siswa dengan *slow learner* atau pembelajar lambat. *Slow learner* adalah kondisi kemampuan intelektual yang memiliki kesulitan memahami materi abstrak, daya ingat pendek, kesulitan konsentrasi, sosial dan motorik.

Menurut Wiwin terdapat tantangan dalam menyelenggarakan sekolah inklusi yakni tidak ada SDM guru pendamping profesional untuk mendampingi siswa penyandang disabilitas saat belajar dikelas. Berikutnya, masih seringnya muncul stigma sosial terhadap siswa penyandang sosial ditengah-tengah masyarakat.

Menanggapi permasalahan di sekolah SDN Kedungudi Trawas tersebut maka pendekatan Sosiologi Inklusi menawarkan alternatif solusi yang tepat dan strategis yang bertujuan sebagai upaya preventif menekan praktik-praktik konstruksi sosial yang eksklusif terhadap siswa penyandang disabilitas dilingkungan sekolah. Upaya preventif sebagai bagian program pengabdian kepada masyarakat (PKM) dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan kepada komponen sekolah antara lain guru, siswa dan orang tua. Pelatihan reflektif ini bertajuk 'Membangun Empati Siswa terhadap Penyandang Disabilitas di Sekolah Dasar Kedungudi Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur'.

Desa Kedungudi merupakan salah satu desa dari total 13 desa yang tersebar diwilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur. Desa ini berada di bawah kaki Gunung Penanggungan. Desa Kedungudi sisi utara berbatasan dengan Desa Seloliman; selatan berbatasan dengan Desa Desa Penanggungan; sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kemendung dari Desa Penanggungan; dan di sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Penanggungan.

Penduduk Desa Kedungudi umumnya bersuku Jawa ada sebagian kecil merupakan campuran dari Suku Jawa dan Madura. Sementara itu, mata pencaharian penduduk desa bekerja disektor pertanian padi, perkebunan, beternak, dan tukang bangunan. Desa Kedungudi merupakan sentra produksi kerupuk samiler.

Pendidikan inklusif di Indonesia merupakan alternatif pendekatan transformatif yang bertujuan untuk mengatasi segregasi dalam sistem pendidikan dengan menciptakan lingkungan belajar dimana setiap peserta didik tidak lagi memandang kondisi fisik, intelektual, sosial-emosional, linguistik, atau lainnya. Sehingga antar peserta didik dapat saling mengerti dan menerima secara penuh satu sama lain dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhannya. Pendidikan Filosofi intinya adalah bahwa sistem pendidikanlah yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan setiap peserta didik, bukan sebaliknya.

Gagasan pendidikan inklusi di Indonesia telah mendapatkan dasar hukum. Pada tingkat tertinggi payung hukum adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.

Selanjutnya, untuk menjabarkan mandat UU No. 8 Tahun 2016 ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. UU ini mewajibkan sarana

prasarana semua sekolah reguler (bukan SLB) yang mencakup modifikasi kurikulum, alat bantu belajar, tenaga pendukung, dan fasilitas yang aksesibel. Sebelumnya, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 telah menjadi cikal bakal dasar hukum pendidikan inklusif, meski kini telah dicabut dan digantikan oleh peraturan yang lebih komprehensif. Kerangka hukum nasional ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang mengatur implementasi spesifik sesuai konteks dan sumber daya daerah.

Prinsip utama yang ditegaskan oleh seluruh regulasi ini adalah aksesibilitas tanpa diskriminasi dan penyediaan akomodasi yang layak. Kedua prinsip tersebut mengarahkan agar sekolah dilarang keras menolak calon siswa berdasarkan disabilitas atau kondisi khususnya. Lebih dari itu, sekolah harus secara aktif memodifikasi lingkungan dan pembelajarannya. Akomodasi ini bisa bersifat akomodasi fisik seperti ramp, toilet disabilitas, jalur pemandu untuk tunanetra, dan kelas yang dirancang untuk kursi roda. Sedangkan akomodasi non-fisik (seperti modifikasi kurikulum, penggunaan alat peraga, extra time selama ujian, dukungan guru pendamping khusus (GPK), terapi wicara atau okupasi yang terintegrasi, serta sistem assessment yang berbeda).

Implementasi di tingkat sekolah melibatkan banyak pihak. Guru kelas dan guru mata pelajaran harus memiliki kompetensi dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu merancang materi, metode, dan evaluasi yang beragam untuk memenuhi berbagai gaya belajar dan kemampuan di satu kelas yang sama. Kehadiran Guru Pendamping Khusus (GPK) seringkali crucial untuk memberikan dukungan intensif kepada siswa berkebutuhan khusus, baik secara akademik maupun perilaku. Selain itu, menciptakan lingkungan sosial yang inklusif sama pentingnya. Ini dilakukan melalui program kesadaran bagi seluruh warga sekolah untuk mencegah perundungan (*bullying*) dan membangun budaya saling menghargai perbedaan, misalnya melalui *peer-support programs* dimana siswa lain diajak untuk menjadi 'teman sebaya' yang membantu.

Peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, sangat vital dalam menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru, mengalokasikan anggaran khusus untuk akomodasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap sekolah-sekolah penyelenggara inklusi. Keterlibatan orang tua siswa juga merupakan kunci keberhasilan. Kolaborasi yang erat antara sekolah dan orang tua diperlukan untuk memahami kebutuhan anak secara mendalam dan menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) yang menjadi peta jalan pembelajaran bagi anak.

Urgensi pendidikan inklusif melampaui sekadar integrasi fisik. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan pendidikan (*equity*), dimana setiap anak

mendapat kesempatan yang adil untuk meraih potensi terbaiknya, dan pada saat yang sama mempersiapkan semua siswa untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dengan penuh empati dan rasa hormat. Meski tantangan seperti keterbatasan anggaran, kesiapan guru, dan perubahan mindset masih ada, komitmen regulasi dan gerakan menuju sekolah yang benar-benar ramah untuk semua anak terus menguat di Indonesia.

Desa Kedungudi memiliki dua sekolah yakni sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK). Bangunan SDN berada disisi selatan desa, sedangkan bangunan TK berada dekat tepat berhadapan dengan kantor balai desa. Lokasi yang menjadi lokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi pendidikan inklusif di sekolah adlaah SDN Kedungudi Trawas Kabupaten Mojokerto.

Sekolah Dasar Negeri Kedungudi berlokasi di Jalan Jolotundo No. 01 Desa Kedungudi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto merupakan sekolah inklusi. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat bertajuk 'Membangun Empati Siswa terhadap Penyandang Disabilitas di Sekolah Dasar Kedungudi Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur'. Sosialisasi ini menggunakan model sosial disabilitas (MSD). MSD merupakan kerangka berpikir yang menekankan bahwa disabilitas bukan semata-mata hasil dari keterbatasan fisik, mental atau permasalahan sensorik individu, akan tetapi adanya struktur sosial yang tidak inklusif. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan di salah satu ruang kelas. Peserta yang hadir meliputi guru-guru SDN Kedungudi dan orang tua siswa.

Kegiatan sosialisasi diawali dengan pemaparan fakta-fakta terkait berita-berita perundungan terhadap siswa penyandang disabilitas baik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat sekitar. Perundungan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perundungan langsung ditandai dengan aktivitas fisik seperti memukul, menendang, bahkan melukai. Sedangkan perundungan tidak langsung dapat berupa menghina, mengumpat bahkan menggunakan bahan candaan atau *guyonan* untuk menggambarkan kondisi siswa penyandang disabilitas.

Tim PKM Sosiologi kemudian memberikan penjelasan bahwa perundungan langsung maupun tidak langsung, keduanya merupakan wujud kekerasan kepada manusia dan perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela.

Dampak serius perundungan dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, stres, dikucilkan hingga potensi hadirnya praktik bunuh diri yang dialami korban perundungan. Perundungan selanjutnya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.



Gambar 1.2 Pelaksanaan Sosialisasi Sekolah Ramah Disabilitas oleh Tim PKM Sosiologi Unesa

Tim PKM menjelaskan kepada peserta seputar bagaimana untuk mengenali sekaligus alternatif solusi mengatasi potensi perundungan yang dialami siswa penyandang disabilitas baik dilingkungan masyarakat Desa Kedungudi dari kacamata Sosiologi. Dalam hal ini tim PKM Sosiologi menggunakan perspektif model sosial disabilitas (MSD).

Langkah pertama, tim PKM Sosiologi menguraikan perbedaan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas dari kacamata model medis disabilitas (MMD) dan model sosial disabilitas (MSD). MMD adalah cara pandang klasik, dan yang paling umum dipahami oleh kebanyakan orang yang memandang seseorang dengan disabilitas merupakan 'produk' dari masalah medis yang melekat pada individu. Ciri-ciri utama cara pandang seseorang atau kelompok menggunakan MMD. Pertama, disabilitas adalah cacat. Disabilitas dilihat sebagai sebuah kekurangan, kerusakan, tidak lengkap, tidak normal dari kondisi 'normal' manusia. Kedua, fokus pada 'perbaikan'. Tujuan 'perbaikan' adalah 'penyembuhan', 'memperbaiki' atau membuat penyandang disabilitas tersebut menjadi 'senormal mungkin' melalui intervensi medis, terapi atau rehabilitasi. Ketiga, masalah ada semata-mata terletak pada individu. Individu yang disabilitaslah yang harus beradaptasi dengan realitas dunia yang sudah ada. Jika itu mereka tidak bisa, itu dianggap sebagai keterbatasan dari kondisi mereka. Keempat, profesional yang mengontrol. Keputusan tentang penanganan atau perawatan medis dan hidup individu kerap dikendalikan oleh tenaga medis, terapis atau ahli lainnya. Contoh konkrit, penggunaan MMD adalah ketika melihat seseorang menggunakan kursi roda dihadapkan pada tangga untuk masuk ke kelas. Cara pandang MMD melihat seseorang menggunakan kursi roda disebabkan kakinya lumpuh dan perlu diobati atau diberikan terapi agar bisa berjalan. Selanjutnya, orang tersebut harus bisa menyadari dan menerima bahwa dia tidak bisa masuk ke kelas itu.

Langkah kedua, tim PKM Sosiologi menguraikan tentang Model Sosial Disabilitas (MSD). MSD populer sekitar tahun 1970an, model ini memisahkan dua konsep penting. Pertama, *impairment* (kondisi fisik/mental). Kondisi fisik atau

mental yang sebenarnya. Misalnya, tidak memiliki lengan, kaki tidak dapat mendengar, atau mengalami down syndrome. Kedua, disabilitas (*disability*). Hambatan struktur sosial yang diciptakan oleh masyarakat yang mencegah seseorang dengan *impairment* berpartisipasi penuh.

Ciri-ciri cara pandang MSD antara lain pertama, hambatan sosial sebagai masalah utama. Disabilitas bukanlah disebabkan kondisi medis, melainkan hasil dari lingkungan yang tidak aksesibel, negatif dan diskriminatif. Kedua, fokus pada perubahan lingkungan. Tujuannya adalah memodifikasi lingkungan utamanya sasaran prasarana, menghilangkan stigma, dan mengubah kebijakan menjadi kearah inklusif. Ketiga, individu adalah ahli atau subjek atas hidupnya. Orang dengan disabilitas dilihat sebagai ahli atas kebutuhan mereka sendiri. Mereka harus terlibat langsung dalam kegiatan pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka sehari-hari. Keempat, hak asasi manusia. Disabilitas adalah masalah hak asasi manusia. Setiap orang berhak memiliki akses yang setara di tengah-tengah masyarakat. Contoh konkretnya adalah ketika orang menggunakan kursi roda sedang berusaha memasuki kelas. Cara pandang MSD adalah bahwa *impairment* -nya adalah tangga yang menghalanginya masuk, sekaligus ketidakterseediaanya ramp atau lift sehingga rodanya bisa masuk ke kelas.

Contoh lain cara pandang MSD di lingkungan sekolah atau di masyarakat sekitar adalah ketika siswa tuna rungu yang kesulitan belajar di sekolah biasa atau sekolah inklusi. *Impairment*-nya adalah tidak berfungsinya indera pendengaran. Sementara disabilitasnya disebabkan sistem pendidikan yang hanya mengandalkan bahasa lisan dan diperparah tidak ada guru pendamping yang menguasai bahasa isyarat. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah menyediakan guru ahli bahasa isyarat di kelas dan menggunakan materi audio visual.

Berikutnya tim PKM Sosiologi Unesa memberikan waktu sesi tanya jawab sebagai respon dari paparan yang telah diberikan.



Gambar 1.3 Peserta Sosialisasi Sekolah Ramah Disabilitas

Peserta atas nama Lilik Mahmudah memberikan tanggapan kepada Tim PKM Sosiologi Unesa seputar kegiatan sosialisasi ini. Guru perempuan ini menyampaikan pengalamannya bahwa sekolah SDN Kedungudi telah ditetapkan oleh bupati Mojokerto sebagai salah satu sekolah inklusi sejak tahun 2022. SDN Kedungudi telah menerima sebanyak tiga siswa penyandang disabilitas. *'Dua siswa Alhamdulillah sudah lulus. Sedangkan satu lagi masih kelas 3 SD.'* Peserta guru lain juga memberikan tanggapan yakni Juarman. Guru laki-laki ini menyatakan bahwa rata-rata tiga siswa penyandang disabilitas mengalami *slow memory*. *'Ketiga siswa tersebut memiliki kesamaan yakni mudah lupa atas materi pelajaran yang telah kita ajarkan. Tapi kita terus memberikan motivasi belajar dan dukungan dari orang tua juga orang sekitar, Alhamdulillah dua siswa tersebut bisa lulus.'*

Selanjutnya guru murah senyum ini menyampaikan keluhan bahwa sejak SDN Kedungudi ditetapkan sebagai sekolah inklusi hingga saat ini belum memiliki guru pendamping profesional yang dapat membantu siswa penyandang disabilitas. *'Sehingga kami sebagai guru mata pelajaran dan guru kelas belajar sendiri mendampingi siswa disabilitas tersebut.'* Selain ketiadaan guru pendamping, sarana prasarana pendukung sekolah inklusi juga belum memadai. Misalnya, belum tersedianya *ramp* yakni jalur bidang miring yang berfungsi sebagai jalur alternatif untuk memudahkan akses pengguna jalan seperti pengguna kursi roda. Selain itu, di sekolah juga belum tersedia alat-alat pendukung proses pembelajaran untuk membantu siswa disabilitas.

Tim PKM Sosiologi Unesa menanggapi berbagai keluhan berupa belum ada sumber daya guru pendamping dan sarana-prasarana pendukung merupakan wujud dari hambatan sosial yang dialami siswa penyandang disabilitas. akibatnya siswa tersebut mengalami kesulitan mengakses sarana prasarana publik yang inklusif. Perlu juga kordinasi yang lebih intensif antara pihak sekolah dengan dinas terkait.

Selanjutnya, Tim PKM Sosiologi Unesa memberikan beberapa langkah bagaimana memberikan bantuan, misalnya kepada penyandang disabilitas penglihatan (PDP). Salah satunya mempraktikkan langsung bersama salah satu guru kelas 3 (tiga) bernama Bapak Juarman. Guru laki-laki yang sudah mengabdikan sejak 17 tahun ini antusias untuk mempraktikkannya.



Gambar 1.4 Bapak Juarman didampingi Tim PKM Sosiologi Unesa untuk dibimbing simulasi cara membantu penyandang disabilitas berjalan.

Langkah pertama, dekati PDP kemudian tawarkan bantuan dan tanyakan tujuannya hendak kemana. Lalu mintalah PDP tersebut memegang lengan Anda tepat di atas siku. Lalu mulai berjalan, letakkan punggung tangan Anda di punggung tangan PDP. Ini akan memungkinkan mereka mengetahui di mana lengan Anda berada. Kemudian, PDP dapat memegang lengan Anda tepat di atas siku. Jangan berpegangan pada PDP.

PDP diperbolehkan memiliki tongkat atau anjing pemandu. Penggunaan anjing pemandu di sekolah diperbolehkan dengan catatan telah diijinkan oleh pihak sekolah. Bisa saja anjing pemandu hanya diperbolehkan berhenti didepan pagar sekolah, sehingga saat masuk lingkungan sekolah, PDP dibantu rekan atau guru pendamping. Tongkat biasanya dipegang dengan menggunakan tangan yang dominan. Biarkan mereka menggunakan tangan tersebut tanpa tongkat atau anjing pemandu.

Langkah kedua, pastikan PDP berada setengah langkah hingga satu langkah di belakang Anda. Pastikan PDP berada setengah hingga satu langkah di belakang Anda. Ia juga harus sedikit di sebelah kiri atau kanan Anda. Pertahankan kecepatan langkah kaki Anda agar saat berjalan keduanya merasa nyaman. Tanyakan secara berkala apakah ia ingin bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Waspadaai rintangan baik tekstur dan kemiringan tanah, di area di samping kanan atau pun kiri, dan apa pun yang menghalangi setinggi kepala. Instruksikan PDP untuk minggir atau merunduk jika perlu.

Langkah ketiga mintalah orang buta berjalan di belakang Anda di ruang sempit. Mintalah PDP di belakang Anda jika sedang berjalan menyusuri ruang sempit seperti lorong kecil atau kerumunan orang, beri tahu PDP agar menyesuaikan cara berjalan Anda saat melewati ruang sempit. Beri tahu PDP bahwa

akan ada ruang sempit. Kemudian, ajari mereka cara bergerak. Mintalah PDP untuk melangkah di belakang Anda. PDP harus tetap meletakkan tangannya di lengan atau dipundak Anda. Anda harus menggerakkan lengan pemandu Anda ke belakang punggung.

Langkah keempat, beritahu PDP jika Anda perlu berganti sisi. Hal ini penting misalnya dalam beberapa situasi menemukan rintangan di jalan Anda saat berjalan. Beri tahu PDP secara lisan bahwa Anda perlu berganti sisi. Minta PDP berhenti sejenak saat berjalan untuk berganti sisi antara Anda dan PDP. Saat Anda berpindah ke sisi yang lain, PDP juga dapat diarahkan untuk beralih memegang lengan Anda yang lain. Sebelum melangkah maju untuk melanjutkan perjalanan, pastikan PDP memegang salah satu lengan Anda tepat di atas siku. Pastikan mereka berada setengah hingga satu langkah di belakang Anda, sedikit di samping Anda, sebelum berjalan.

Tim PKM Sosiologi Unesa juga memberikan cara bagaimana memberikan arahan kepada PDP dalam situasi-situasi khusus. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Pertama, gunakan kata-kata ketika dalam situasi berbahaya atau mengancam. Mungkin ketika menghadapi situasi berbahaya saat mengajak PDP berjalan seperti ada mobil yang melaju kencang, atau anjing yang lepas. Dalam situasi seperti ini, ingatkan bahwa PDP tidak dapat melihat ancaman tersebut. Oleh sebab itu, jangan langsung memindahkan PDP. Gunakan kata-kata Anda untuk mengatakan sesuatu seperti, 'berhenti' atau 'minggir' Setelah Anda berhasil membawa PDP keluar dari bahaya, berikutnya jelaskan ancamannya.

Kedua, bergerak melewati pintu. Saat memandu PDP, Anda mungkin perlu membantunya melewati pintu. Dalam situasi seperti ini, pastikan untuk mengambil tindakan pencegahan khusus agar semuanya berjalan lancar. Berikan arahan lisan kepada PDP bahwa didepan terdapat pintu yang harus dilewati. Jelaskan arah pintu terbuka saat Anda mendekatinya. Buka pintu dan lanjutkan berjalan bersama PDP yang Anda pandu.

Ketiga, melewati tangga dan anak tangga. Penting bagi Anda untuk mengambil tindakan pencegahan keselamatan untuk menghindari kecelakaan atau cedera saat menaiki tangga atau anak tangga. Beri tahu PDP secara lisan ketika tangga akan naik. Beri tahu mereka apakah tangganya posisi naik atau turun. Jelaskan ciri khas tangga tersebut sebelumnya. Beri tahu mereka jika tangganya banyak atau sedikit, tetapi jangan menghitungnya karena dapat mengganggu.

Sampailah di tepi tangga, kemudian tanyakan kepada PDP kapan ia siap untuk melanjutkan. PDP mungkin ingin meluangkan waktu sejenak untuk

menyesuaikan diri sebelum naik atau turun tangga. Naik atau turun tangga, tetaplah posisi Anda selangkah di depan PDP. Berjalanlah perlahan untuk menghindari resiko cedera. Saat Anda mencapai puncak atau dasar tangga, berhentilah agar PDP menyusul dan memberi tahu PDP.

Umumnya beberapa tangga di gedung-gedung publik memiliki penanda taktil di bagian atas atau bawah tangga untuk memberi tahu PDP. Meskipun bermanfaat, Anda tetap harus memberi tahu PDP secara lisan jika ada tangga, serta apakah tangga menuju arah naik atau turun.

Keempat, bantuan untuk tempat duduk. Selain berjalan, Anda mungkin perlu membantu PDP duduk. Beri tahu PDP ke arah mana kursi menghadap. Dekati kursi dan letakkan lengan Anda di atasnya. Beri tahu PDP bagian kursi mana yang Anda sentuh. PDP dapat menggerakkan lengannya ke bawah, merasakan kursi, dan kemudian mencari tahu cara duduk.

Kelima, memandu PDP masuk dan keluar dari mobil. Jika Anda menuntun PDP ke mobil, tawarkan bantuan untuk membantunya masuk ke dalam mobil. Pastikan Anda bertanya apakah PDP tersebut membutuhkan bantuan sebelum membantu. Beri tahu PDP ke arah mana mobil menghadap dan pintu mana yang Anda buka. Letakkan tangan Anda di gagang pintu. Mintalah PDP untuk meraba tangan Anda untuk menemukan gagangnya. Dari sini, Anda bisa membiarkan PDP masuk ke dalam mobil sendiri atau sarana transportasi umum. Setelah PDP duduk dengan aman di dalam mobil, biarkan mereka menutup pintu.

Berbagai bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas tentu merupakan tindakan yang terpuji dan manusiawi. Hanya saja yang perlu ditekankan sebelum membantu yakni menjelaskan berbagai hal yang harus disepakati dan dimengerti oleh PDP, sebab hal ini penting sebagai upaya untuk menegakkan prinsip saling menghormati dan menghargai.

Pertama, prinsip menghormati. Tindakan ini bisa ditunjukkan ketika ingin membantu PDP berjalan namun diawali dengan menawarkan bantuan. Langkahnya adalah dekati, tanyakan, lalu bantu. Tidak sedikit orang yang berniat baik melihat PDP di jalan dan berasumsi mereka harus membantu. Meskipun membantu orang di sekitar Anda adalah ide yang mulia, Anda tidak boleh membantu seseorang tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan bantuan. Dekati dan tanya sebelum Anda membantu. Dekati PDP terlebih dahulu, sapa mereka dan perkenalkan diri Anda. Tanyakan dengan sopan apakah mereka butuh bantuan. Cobalah sesuatu seperti, *'Saya perhatikan Anda sedang mencoba menyeberang jalan dan apakah Anda butuh bantuan?'* Jika PDP

tersebut membutuhkan bantuan, biasanya akan memberi tahu Anda. Tidak semua PDP membutuhkan bantuan, jadi jangan tersinggung jika tawaran Anda ditolak.

Kedua, jangan terlalu over protektif. Banyak PDP telah lama menghadapi disabilitas mereka. PDP seringkali terbiasa menghadapi potensi ancaman. Meskipun penting bagi Anda untuk memberi tahu PDP tentang mobil yang datang atau cabang pohon yang rendah, usahakan untuk tidak terlalu protektif. Cukup berikan anjuran kepada PDP untuk minggir atau merunduk jika benar-benar diperlukan.

Ketiga, jelaskan kondisi lingkungan yang hendak dilewati. Tidak sedikit PDP senang jika dijelaskan kondisi pemandangan sekitar. Saat memandu PDP, akan menyenangkan untuk menceritakan apa pun yang terlihat atau menarik saat berjalan. Namun, berhati-hatilah sebab tidak sedikit pula beberapa PDP mungkin lebih suka berjalan dalam diam atau mungkin merasa terganggu oleh obrolan yang berlebihan. Oleh sebab itu, ada baiknya Anda bertanya terlebih dahulu sebelum menjelaskan pemandangannya.

Keempat, berikan arahan secara lisan. Anda perlu memberikan arahan verbal yang spesifik agar dapat dipahami oleh PDP. Katakan, 'Anda sebentar lagi belok kiri; Anda sebentar lagi melewati ranting pohon, mohon menunduk.'

Selain menjelaskan cara membantu PDP, Tim PKM Sosiologi Unesa juga memberikan alternatif solusi bagaimana mengatasi stereotip dan stigma terhadap penyandang disabilitas. Langkah-langkah alternatif berbasis model sosial disabilitas ini dapat diterapkan antara lain :

1. Membangun Kesadaran.

Membangun kesadaran ini dapat dilakukan melalui kampanye, lokakarya, dan pelatihan di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak, kemampuan, dan potensi penyandang disabilitas. Selain itu, media berperan penting dalam menampilkan sisi positif dan prestasi penyandang disabilitas untuk melawan pandangan negatif dan stereotip yang salah dan diskriminatif.

2. Menciptakan Lingkungan Inklusif

Memastikan penyandang disabilitas memiliki akses penuh dan dapat berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Selain itu, juga diterapkan kebijakan inklusif di tempat kerja, institusi pendidikan, dan ruang publik untuk menghapus hambatan fisik dan sosial.

3. Memberdayakan dan Melibatkan Penyandang Disabilitas

Melibatkan penyandang disabilitas secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, bukan hanya sebagai objek kebijakan. Selain itu, menghargai dan mengakui kontribusi mereka di

berbagai bidang untuk menginspirasi orang lain dan mematahkan stereotip bahwa mereka hanya memiliki keterbatasan.

4. Mengubah Cara Berinteraksi dan Berbahasa

Berbicara langsung kepada penyandang disabilitas, bukan kepada pendamping atau penerjemahnya, dan lakukan kontak mata langsung. Praktik ini dapat menggunakan bahasa yang sesuai dan hindari ungkapan yang merendahkan atau mengasihani. Jangan pernah mengasumsikan seseorang adalah 'korban' karena disabilitasnya. Banyak penyandang disabilitas menjalani hidup penuh dan telah menerima disabilitas mereka sebagai bagian dari identitas.

5. Melawan Perundungan dan Stigma di Masyarakat

Dari perspektif sosiologis, strategi efektif untuk melawan perundungan dan stigmatisasi memerlukan langkah-langkah penanganan yang holistik dan terintegrasi. Praktik-praktik perundungan bukan sekadar masalah individu, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks dan mengejala yang melibatkan oknum kelompok. Untuk mengatasi masalah ini kunci utamanya adalah melalui edukasi dan sosialisasi yang masif kepada seluruh komunitas (siswa, guru, orang tua) guna meningkatkan pemahaman tentang bentuk dan dampak negatif tindakan tersebut. Kemudian, penting komunikasi terbuka antar berbagai pihak, menanamkan nilai-nilai empati dan toleransi serta menegakkan aturan dan sanksi yang jelas secara konsisten tersebut guna menciptakan lingkungan yang aman.

Selanjutnya, pada tingkat intervensi langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan deteksi dini dan penanganan segera guna mencegah eskalasi. Cara ini dapat diwujudkan dengan memberikan dukungan dan perlindungan penuh kepada korban. Sementara pelaku dapat dibimbing untuk menyadari konsekuensi atas perbuatannya dan segera memperbaiki diri. Dengan demikian, solusi berkelanjutan dapat mengadakan pelatihan resolusi konflik untuk membentuk interaksi sosial yang lebih positif dan harmonis di dalam masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan PKM Sosiologi Unesa di SDN Kedungudi, Mojokerto Jawa Timur, berhasil melaksanakan sosialisasi inklusi disabilitas berbasis Model Sosial Disabilitas (MSD). Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan guru dan orang tua, program ini mengidentifikasi tantangan utama berupa keterbatasan guru pendamping dan sarana prasarana inklusif. Simulasi praktis—seperti teknik memandu tunanetra—serta diskusi kritis berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas stigma

maupun labelling. Kegiatan ini tidak hanya membangun empati, tetapi juga menjadi fondasi awal untuk mengadvokasi kebijakan inklusif di tingkat lokal, sejalan dengan semangat *nothing about us without us*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M. (2020). Developing inclusive schools: Pathways to success. Routledge.
- Allman, D. (2013). The sociology of social inclusion. Sage Publications.
- Barnes, C., & Mercer, G. (2010). Exploring disability: A sociological introduction (2nd ed.). Polity Press.
- Oliver, M. (1990). The politics of disablement. Macmillan.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49.
- Shakespeare, T. (2006). Disability rights and wrongs. Routledge.